
DAMPAK HUTAN KEMASYARAKATAN TERHADAP ASPEK EKONOMI MASYARAKAT DESA SEI. NAGALAWAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Ahmad Guru Hasibuan¹, Citra Rahmatia², Riko Kurniawan³

¹²³Program Studi Kehutanan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi, Indonesia

Email: ¹ahmadguruhsb78@gmail.com, ²citrarahmatia@gmail.com, ³rikokurniawan86@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: ahmadguruhsb78@gmail.com

Keyword :	ABSTRACT
Forest, Social Forestry, HKm, Ecotourism, Mangrove Beach.	Indonesia is a tropical country that has quite extensive forest areas. The existence of this forest area is a national asset that must be managed and developed in a better direction, so that it can be used sustainably. The existence of Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 concerning Social Forestry is of course an opportunity for the people of Sei Nagalawan Village to participate in this program. (SK.4108/MENLHK-PSKL/PKPS/ PSL.0/6/2020 dated 29 June 2020 concerning the granting of IUPHKm to the Muara Baimbai Mangrove Conservation Group covering an area of ±2 Ha). The aim of this research is to determine the effect of social forestry permits on improving the economy of the Muara Baimbai Mangrove Conservation Group. The research method used is a qualitative method. The data collection carried out during the research was carried out using data triangulation, namely a data collection technique that combines various data collection techniques and existing data sources and constraints in the management of the Muara Baimbai Mangrove Conservation Group's HKm. Based on the research results, it can be concluded that social forestry permits have an effect on improving the economy of the Muara Baimbai Mangrove Conservation Group during 2020-2024, experiencing a decrease in visitors. External and internal factors are obstacles faced in managing the Community Forest of the Muara Baimbai Mangrove Conservation Group. External factors include competition between other tourism sites adjacent to ecotourism and internal factors such as inadequate facilities and infrastructure in ecotourism.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Keberadaan kawasan hutan ini merupakan aset nasional yang harus dikelola dan dikembangkan kearah lebih baik, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan [1]. Menurut Nunaki (2007), hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai manfaat besar bagi bangsa Indonesia yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional dengan memperhatikan kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang [2].

Hutan menurut UU No 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Hutan juga memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satu manfaat hutan menurut Arief Arifin (2001), berasal dari perolehan devisa kayu yang dihasilkan, sehingga hutan dianggap penting dalam menunjang pembangunan nasional. Selain itu terdapat beberapa fungsi

hutan, seperti fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomis dengan disertai kemampuan pembangunan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi [3]. Indonesia memiliki luas hutan sebesar 144 juta Ha atau 75% dari total luas daratan, terbagi menjadi 49 juta Ha areal hutan lindung, 64 juta Ha hutan produksi dan selebihnya sebesar 31 juta Ha disediakan untuk keperluan perluasan pertanian. Sebagian besar hutan di Indonesia merupakan milik negara dan secara administrasi lahan-lahan di dalam hutan telah dipetakan berdasarkan penggunaan dan fungsinya [4]. Namun, pada dasarnya terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di bidang kehutanan seperti halnya perambahan, illegal logging, dan konflik tenurial. Hal ini juga sangat berdampak pada masyarakat yang bermata pencaharian di sekitar kawasan hutan.

Tujuan Perhutanan Sosial terbagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perhutanan sosial memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola hutan pada setiap wilayah hingga 12,7 juta Ha atau sekitar 10% dalam bentuk hutan sosial. Dalam jangka menengah, perhutanan sosial bertujuan dapat memperbaiki sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan seperti memperbaiki akses sarana dan prasarana untuk desa maupun untuk kehidupan masyarakatnya sehingga masyarakat dapat menjual hasil hutan di pasaran. Sedangkan dalam jangka panjang, perhutanan sosial diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja dengan banyaknya sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang dapat dijual hingga mancanegara [5][6].

Dalam prosesnya, HKM Konservasi Mangrove Muara Baimbai tentu saja memiliki hambatan ataupun permasalahan yang dihadapi selama proses pengelolaan berlangsung. Oleh karena itu, selain memperoleh hasil evaluasi dari aspek ekonomi dan aspek kehutanan, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan saran atau masukan terkait permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan HKM Konservasi Mangrove Muara Baimbai. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak hutan kemasyarakatan yang telah didapat HKM Konservasi Mangrove Muara Baimbai terhadap aspek ekonomi kelompok guna mengetahui peningkatan pendapatan setelah adanya izin tersebut dan juga kendala yang dialami kelompok dalam pengelolaan izin tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa, Alat Tulis, Avenza Map, Handphone, dan kuesioner yang telah disiapkan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Pengambilan data yang dilakukan saat pelaksanaan penelitian dilakukan dengan triangulasi data yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada [7] [8].

a. Sumber Daya

1. Responden/Informan

Responden/Informan yang dipilih merupakan anggota kelompok Konservasi Mangrove Muara Baimbai sebanyak 32 orang dengan metode sensus (wawancara).

2. Dokumentasi

Catatan-catatan yang berasal dari pertanyaan dan jawaban dari responden untuk mendukung masalah penelitian ini.

b. Jenis Data

1. Data Primer, diperoleh langsung dari wawancara dengan responden/informan dan observasi.

-
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian selama \pm 8 bulan maka pada bab ini peneliti akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara mendalam kepada anggota Kelompok Konservasi Mangrove Muara Baimbai di Desa Sei Nagalawan terkait dengan dampak izin perhutanan sosial berupa Hutan Kemasyarakatan terhadap aspek ekonomi masyarakat.

Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk informan kunci, peneliti mewawancarai 2 pihak pengurus Kelompok Konservasi Mangrove Muara Baimbai. Untuk informan pendukung peneliti mewawancarai 30 orang Kelompok Konservasi Mangrove Muara Baimbai. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara bertahap dalam rentang pada tanggal 12 Februari 2024 – 24 Agustus 2024.

Ekowisata Pantai Mangrove Muara Baimbai berada didalam kawasan hutan lindung sesuai dengan SK.6609/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 [9]. Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sehingga Kelompok Konservasi Mangrove Baimbai harus membuat permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan pada instansi terkait agar dapat memperbaiki akses jalan yang menuju lokasi ekowisata tersebut sehingga dapat meningkatkan pengunjung ekowisata pantai mangrove tersebut.



Gambar 1. Diagram Pengunjung Ekowisata

Berdasarkan dari diagram diatas bahwa Ekowisata Pantai Mangrove Muara Baimbai mengalami peningkatan jumlah pengunjung dari tahun 2016 sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan pengunjung yang diakibatkan adanya pandemi covid 19 sehingga kelompok konservasi mangrove muara baimbai mengusulkan sebagian wilayah pesisir pantainya untuk Program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pada tahun 2020 ekowisata tersebut masih mengalami penurunan pengunjung dan pada tahun tersebut kelompok konservasi mangrove muara baimbai mendapatkan izin Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pada tahun 2021 ekowisata tersebut mengalami kenaikan pengunjung secara bertahap sampai tahun 2024 setelah adanya izin Hutan Kemasyarakatan tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa izin perhutanan social berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian Kelompok Konservasi Mangrove Muara Baimbai selama 2020-2024 mengalami penurunan pengunjung. Faktor eksternal dan internal merupakan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Konservasi Mangrove Muara Baimbai. Faktor eksternal adanya persaingan antar wisata lain yang berdampak dengan ekowisata tersebut dan faktor internal seperti sarana dan prasarana yang belum memadai di ekowisata tersebut.

REFERENCES

- [1] Andriani, Novia, Nukeu. (2019). Pengembangan Ekowisata Mangrove dikawasan Nipah, Kabupaten Serdang Bedagai - SUMATERA UTARA. *Open Journal System* Vol.13 No. 11. Juni 2019
- [2] Aletrino, Lisa, Mahdi, & Sari, Rina. (2021). Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal of Socio Economics on Tropical Agriculture* 3(1): 276-285..
- [3] Arief, Arifin (2001). *Hutan & Kehutanan*. Penerbit Yogyakarta : Kansius. Tahun 2001.
- [4] Balai Perhutanan sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera, 2017. *Kumpulan Peraturan Perhutanan sosial*. Jakarta : Balai Perhutanan sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera.
- [5] Dianti, Rahmah, Putri, (2017). Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berdasarkan Aspek Tata Kelola Usaha Di HKm Senggigi Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Sylva Lestari* 7(2) : 150-163.
- [6] Farid, Miftah, Achmad, Fahreza, Ahmad, Fandi, Prasetyo, Catur, Putra, Dimas, & Firmasnyah, Herlian, Shandy. (2022). Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Solusi Meminimalisir Deforestasi Di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta . *Bina Lingkungan Hidup* Vol.7 No. 1. Oktober 2022.
- [7] Laksemi, Sekar T, Ni Putu, Sulistyawati, Endah, Mulyaningrum. (2019). Perhutanan SosialcBerkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari* 7(2) : 150-163.
- [8] *Literatur Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana Kerja Usaha Kelompok HKm Konservasi Mangrove Muara Baimbai tahun 2020-2030.*
- [9] *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.*